



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

BISA!

PEDOMAN TEKNIS

Kopide

KOLABORASI PERENCANAAN DAN INOVASI DAERAH

STRATEGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN MELALUI
KOLABORASI PERENCANAAN
DAN INOVASI DAERAH

UTAM FERDIAN, ST

NIP. 19780208 200803 1 002

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN & EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDALITBANG KABUPATEN BULUNGAN

NDH 37

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN I TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2021-2026, sampai dengan tahun 2023 pencapaian target kategori tinggi diangka 95 sampai 97 persen, namun tetap perlu ditingkatkan terutama pada program prioritas nasional maupun daerah serta program kegiatan terkait urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bulungan tahun 2023 juga menggambarkan bahwa tidak semua bidang SPM tercapai, terdapat 3 (tiga) bidang yaitu bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, dan bidang sosial yang memenuhi target 100 persen, sedangkan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang tidak mencapai target.

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bulungan, masalah pokok yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.

Dengan analisis permasalahan yang diuraikan diatas, bahwa solusi yang dilakukan berupa strategi percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi perencanaan dan inovasi daerah dengan memasukkan unsur inovasi dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah yang akan menjawab permasalahan-permasalahan pada perangkat daerah. Inovasi diatas diharapkan dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian pembangunan daerah

2. Tujuan

- Tercapaian target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- Meningkatnya indeks inovasi daerah
- Terintegrasi sistem perencanaan dan penelitian, penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dengan pemanfaat inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Sasaran

1. Tersedianya data potensi inovasi daerah
2. Tersedianya desain kolaborasi perencanaan dan inovasi daerah
3. Meningkatnya indeks inovasi daerah
4. Integrasi fungsi bidang PPEPD dan bidang Litbang
5. Inovasi yang ada pada perangkat daerah termanfaatkan secara maksimal
6. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
7. Mendorong budaya inovasi pada perangkat daerah

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

Ruang lingkup dari Inovasi “Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Kolaborasi Perencanaan dan Inovasi Daerah” adalah pelaksanaan inovasi pada perencanaan pada perangkat daerah dilingkup Kabupaten Bulungan. Aksi perubahan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas reformers, yaitu mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah, dan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian salah satu sasaran organisasi (Bappedalitbang), yaitu meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan.

Lokus perubahan yang dilakukan (jangka pendek) dari aksi perubahan ini yaitu 14 (sebelas) perangkat daerah pengampu program pengentasan kemiskinan di pemerintahan kabupaten bulungan dan Standar Pelayanan Minimal:

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
- 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 7 Dinas Ketahanan Pangan
- 8 Dinas Sosial
- 9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 10 Dinas Pertanian
- 11 Dinas Perikanan
- 12 Dinas Perhubungan
- 13 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Perencanaan

- **Koordinasi dengan Mentor:** Koordinasi dengan Mentor (Kepala Bappedalitbang) Bapak Ir. Iwan Sugiyanta, S.T., M.T dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024
- **Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan eksternal**
- **Survey dan menyusun hasil Identifikasi Potensi Inovasi**
- **Penyusunan Desain dan Draft “KOPIDE”**
- **Penyusunan Draft SE “KOPIDE**
- **Penyampaian & Pembahasan Draft SE “KOPIDE”**

2. Tahap Pelaksanaan

- **Rapat Pembentukan Tim Efektif**
- **Pembuatan SK Tim Efektif**
- **Penetapan Surat Edaran Bupati**
- **Sosialisasi Inovasi**
- **Bimtek inovasi**
- **Penerapan Kolaborasi Perencanaan & Inovasi Daerah**

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan evaluasi terhadap penerapan kolaborasi perencanaan dan inovasi pada perangkat daerah dengan cara konfirmasi langsung dengan 14 perangkat daerah.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur efektivitas inovasi, berikut adalah indikator utama yang harus dicapai:

Kategori Inovasi	Indikator Keberhasilan Terukur
Membangun Integrasi dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Kepemimpinan transformasional memiliki peran dalam membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi.
Pengelolaan Budaya Kerja	Pengelolaan budaya kerja yang efektif memerlukan upaya bersama dan berkelanjutan dengan komitmen seluruh tim.
Membangun Jejaring dan Kolaborasi	Membangun jejaring dan kolaborasi adalah suatu langkah untuk membangun kekuatan bersama yang menjadi modal untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB V

PENUTUP

Dalam menjawab permasalahan yang ada terutama terkait dengan kurang efektif dan efisiennya koordinasi antar bidang pada bappedalitbang dalam pencapaian target pembangunan daerah perlu memaksimalkan kolaborasi perencanaan dan inovasi daerah dengan pemanfaatan inovasi mulai dari perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Perangkat daerah memiliki inovasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian target kinerja instansi (perangkat daerah) yang berdampak pada pencapaian target indikator kinerja utama pemerintah daerah.